

Hijau Atau Merah Paspor Kita Tetap Lemah: Diskursus Kekuatan Paspor

*Green or Red, Our Passports are Still Weak:
The Discourse of Passport Power*

Hetri Pima Anggara

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia
Email: hetri.pima@ui.ac.id

Riwayat Artikel

Diterima: 6 Agustus 2024
Direvisi: 14 Oktober 2024
Disetujui: 25 Oktober 2024

doi:10.22212/jp.v15i2.4662

Abstract

On August 17, 2024, Indonesia released a new passport design themed on the archipelago's fabrics. The public felt that strengthening the power of Indonesia's passport was more important than changing the design. The public even compared the power of Indonesia's passport, which is weaker than those of neighboring countries. In the discourse of the passport's power, it is unclear whether the 'power' in question refers to the passport as a document or the country that issued the passport. This research aims to explore whether the passport's power is directly proportional to the material power of the issuing country and criticize the meaning of the passport's power. To reveal the meaning of passport power, this paper uses the concept of power in a constructivist perspective, which is then compared with material power attributes. Comparison reveals that the material power of a country does not always reflect the power of its passport. Indonesia's passport is weaker because the visa granting policy is based on ideational aspects in bilateral interactions between countries and not solely on the country's material capabilities. The passport power narrative has a political dimension by benefiting certain parties in the discourse. The word 'power' will justify hegemonic structures and reinforce discrimination against low-ranking countries.

Keywords: Discourse; Henley Passport Index; Power; Passport; Visa.

Abstrak

Pada 17 Agustus 2024, Indonesia merilis desain paspor baru bertema kain nusantara. Publik menilai bahwa peningkatan kekuatan paspor lebih penting daripada perubahan desain. Publik bahkan membandingkan kekuatan paspor Indonesia yang lebih lemah dari negara-negara tetangga. Dalam diskursus kekuatan paspor tidak jelas 'kekuatan' yang dimaksud merujuk pada paspor sebagai dokumen atau negara yang menerbitkan paspor. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah kekuatan paspor berbanding lurus dengan kekuatan material negara penerbitnya serta mengkritisi pemaknaan kekuatan paspor. Untuk mengungkap pemaknaan kekuatan paspor tulisan ini menggunakan konsep kekuatan dalam perspektif konstruktivis yang selanjutnya dikomparasikan dengan atribut kekuatan material. Komparasi mengungkapkan bahwa kekuatan material suatu negara tidak selalu menggambarkan kekuatan paspornya. Paspur Indonesia lebih lemah karena kebijakan pemberian visa didasarkan pada aspek ideasional dalam interaksi bilateral antar negara dan bukan semata-mata pada kemampuan materiil negara. Narasi kekuatan paspor berdimensi politis dengan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang dalam diskursus. Kata 'kekuatan' akan menjustifikasi struktur hegemoni dan meneguhkan diskriminasi terhadap negara-negara peringkat rendah.

Kata Kunci: Diskursus; Henley Passport Indeks; Kekuatan; Paspur; Visa.

Pendahuluan

Pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-79, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Direktur Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi) meluncurkan desain paspor baru Indonesia dengan tema kain nusantara. Desain paspor baru ini memiliki sampul berwarna merah dengan tulisan berwarna putih yang merepresentasikan warna bendera Indonesia, menggantikan desain lama yang berwarna hijau toska. Dirjen Imigrasi menjelaskan bahwa alasan pembaruan desain paspor adalah untuk meningkatkan fitur keamanan secara berkala sesuai standar *International Civil Aviation Organization (ICAO)*.¹ Perubahan ini mendapat tanggapan publik yang beragam di media sosial. Ada yang mengapresiasi pembaruan desain namun banyak yang memberi kritikan negatif. Publik menilai bahwa perubahan desain bukanlah sesuatu yang urgen. Meningkatkan kekuatan paspor lebih penting dibandingkan mengganti warna paspor. Publik bahkan membandingkan kekuatan paspor Timor Leste yang lebih tinggi dari paspor Indonesia. Percakapan publik di media sosial fokus pada kekuatan paspor dibandingkan tujuan sebenarnya yaitu peningkatan fitur keamanan.²

Penelusuran daring menemukan bahwa media Indonesia pertama yang mengangkat wacana kekuatan paspor adalah Merdeka.com pada 2 April 2015. Dengan tajuk berita "Paspor Indonesia tak laku di banyak negara, kalah dari

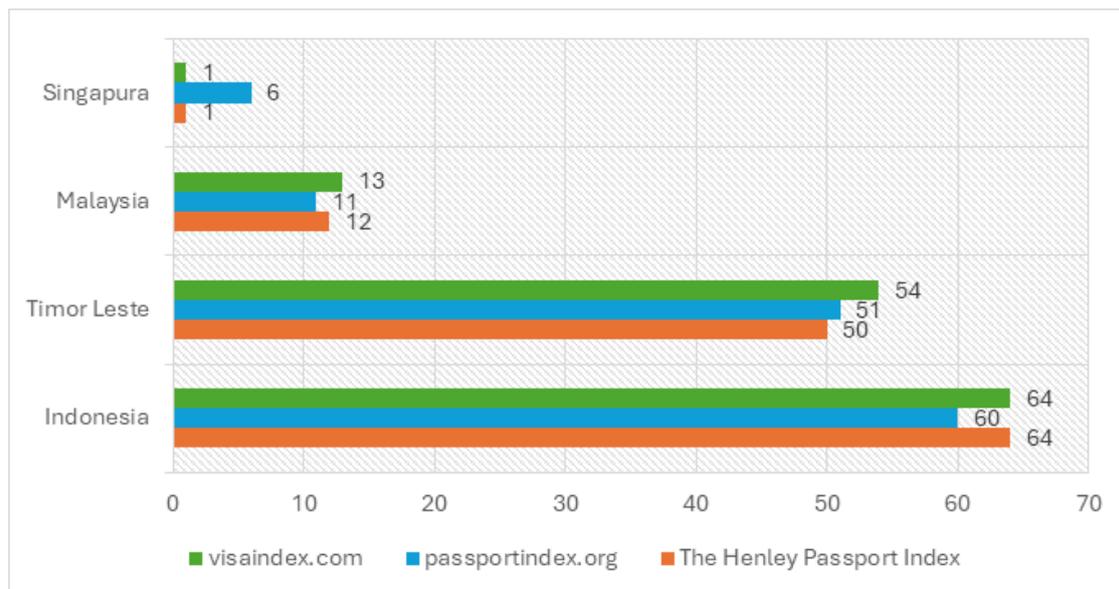
Zimbabwe", Merdeka.com membandingkan bebas visa bagi paspor Indonesia yang hanya ke 56 negara lebih rendah dibandingkan Zimbabwe ke 61 negara dan Samoa 85 negara.³ Pada bulan yang sama detikcom mengangkat berita pada 17 April 2015 bertajuk, "Sesakti Apa Paspor Indonesia, Cek Di Sini!". Berita tersebut juga membandingkan kekuatan paspor Indonesia dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.⁴

Diskursus mengenai kekuatan paspor di media seringkali berfokus pada peringkat paspor serta dampaknya bagi pemegang paspor. Membandingkan mobilitas paspor dengan seberapa banyak akses bebas visa yang diperoleh. Paspor dibingkai sebagai simbol dari prestise yang mana semakin banyak akses bebas visa yang dimiliki maka semakin kuat negara tersebut. Media menjadi sarana diseminasi mengenai wacana kekuatan paspor dengan membentuk pemahaman mengenai arti penting dari kekuatan paspor. Sedangkan media sosial dalam diskursus ini menjadi sarana diskusi publik dan bertukar pengalaman mengenai proses visa atau kesulitan dalam perjalanan yang dihadapi. Nilai paspor menentukan bagaimana mereka diperlakukan dalam konteks mobilitas internasional sebagai ajang persaingan status, yaitu kebanggaan atau pun rasa malu.⁵

Pada diskusi yang meluas, publik meluapkan emosi tersebut dengan keinginan melepas kewarganegaraan Indonesia karena paspornya

- 1 Ditjen Imigrasi, "Kado Hari Ulang Tahun RI: Wajah Baru Paspor Indonesia," Ditjen Imigrasi, August 17, 2024, https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/17/kado-hari-ulang-tahun-ri-wajah-baru-paspor-indonesia.
- 2 Femi Diah, "Paspor Indonesia Jadi Merah, Kapan Lebih Kuat?," detikcom, August 19, 2024, <https://travel.detik.com/travel-news/d-7496866/paspor-indonesia-jadi-merah-kapan-lebih-kuat>; Rindi Salsabilla, "Desain Baru Bikin Ranking Paspor RI Menguat? Ini Kata Sandiaga," CNBC Indonesia, August 21, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240821090806-33-565029/desain-baru-bikin-ranking-paspor-ri-menguat-ini-kata-sandiaga>.

- 3 Merdeka.com, "Paspor Indonesia Tak Laku Di Banyak Negara, Kalah Dari Zimbabwe," Merdeka.com, April 2, 2015, <https://www.merdeka.com/dunia/paspor-indonesia-tak-laku-di-banyak-negara-kalah-dari-zimbabwe.html>.
- 4 detikcom, "Sesakti Apa Paspor Indonesia, Cek Di Sini!," detikcom, April 17, 2015, <https://travel.detik.com/travel-news/d-2890729/sesakti-apa-paspor-indonesia-cek-di-sini>; detikcom, "Ini Dia Paspor Paling Sakti & Paling Cupu Sedunia," detikcom, April 17, 2015, <https://travel.detik.com/travel-news/d-2890797/ini-dia-paspor-paling-sakti-paling-cupu-sedunia>.
- 5 Yossi Harpaz, "Conspicuous Mobility: The Status Dimensions of the Global Passport Hierarchy," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 697, no. 1 (September 21, 2021): 43, <https://doi.org/10.1177/00027162211052859>.



Gambar 1 Perbandingan Peringkat Paspor

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024.

lemah. Emosi diartikan di sini sebagai bentuk penilaian moral yang mencerminkan evaluasi intelektual terhadap pengalaman masa lalu serta harapan terhadap masa depan.⁶

Gambar 1 menampilkan perbandingan peringkat paspor empat negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste, berdasarkan penilaian tiga lembaga konsultan swasta. Dalam perbandingan tersebut, terlihat bahwa peringkat paspor Indonesia lebih rendah dibandingkan Timor Leste, yang berada di peringkat 50-an. Sementara itu, paspor Malaysia dan Singapura berada pada posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Perbedaan peringkat ini disebabkan oleh variasi dalam indikator dan metode penilaian yang digunakan oleh masing-masing konsultan. Meskipun metodologi mereka berbeda, semua konsultan menggunakan satu indikator utama yang sama, yaitu jumlah akses bebas visa yang dimiliki oleh pemegang paspor sebagai dasar dalam menentukan peringkat. Perbedaan-perbedaan ini menggambarkan bagaimana pendekatan yang digunakan oleh

setiap lembaga dalam mengukur kekuatan paspor dapat menghasilkan hasil yang berbeda, meskipun terdapat kesamaan aspek yang dinilai, yaitu mobilitas global yang diukur melalui akses bebas visa.

Indikator bebas visa memberikan gambaran mobilitas pemegang paspor untuk bepergian tanpa harus mendapatkan persetujuan pra keberangkatan dari negara tujuan melalui proses visa yang membutuhkan waktu, materi, dan tenaga. Sebagai gambaran *The Henley Passport Index* (HPI) membandingkan akses bebas visa dari 199 paspor yang berbeda ke 227 tujuan perjalanan. Paspor yang mendapatkan bebas visa, *visa on arrival*, atau *electronic travel authority* (ETA) bernilai = 1, sebaliknya yang membutuhkan persetujuan formal negara destinasi sebelum keberangkatan bernilai = 0.⁷ Sementara *passportindex.org* membandingkan akses dari 193 negara anggota PBB dan 6 entitas politik dengan *mobility score* yang terdiri dari bebas visa, *visa on arrival*, ETA, dan eVisa dengan nilai dari Indeks Pembangunan Manusia (UNDP HDI) yang mengukur persepsi suatu negara di luar negeri.⁸

6 Simon Koschut, "The Power of (Emotion) Words: On the Importance of Emotions for Social Constructivist Discourse Analysis in IR," *Journal of International Relations and Development* 21, no. 3 (July 28, 2018): 497, <https://doi.org/10.1057/s41268-017-0086-0>.

7 Henley & Partners, "The Henley Passport Index Methodology," Henley & Partners, accessed August 20, 2024, <https://www.henleyglobal.com/passport-index/about>.

8 Passport Index, "About Passportindex.Org," accessed August 20, 2024, <https://www.passportindex.org/>

Diskursus mengenai kekuatan paspor bukanlah hal baru. Praktik penggunaan kata ‘kekuatan’ digunakan oleh *The Henley and Partners (The Henley Passport Power Index)*, *passportindex.org (Global Passport Power Rank)*, media dan publik yang sebenarnya merujuk pada peringkat mobilitas paspor. Ketika membicarakan kekuatan paspor maka referensi publik selalu pada jumlah akses mobilitas yang dimiliki paspor. Mobilitas berkaitan dengan migrasi atau perpindahan individu dari suatu negara ke negara lain secara temporer maupun permanen. Dalam konteks ini mobilitas adalah akses bebas visa, semakin banyak negara yang dapat dikunjungi tanpa visa maka akan semakin kuat paspornya. Pemikiran ini tidak salah tetapi terlalu menyederhanakan wacana yang ada.

Publik memiliki jangkauan kemampuan yang terbatas dalam memahami fenomena hubungan internasional. Penggunaan dan pemilihan kata ‘kekuatan’ memiliki implikasi kognitif bagi publik sebagai *cognitive miser* yang akan memproses informasi secara efisien tanpa menghabiskan sumber daya kognitif.⁹ Penilaian publik awam terbatas pada pengetahuan dan keyakinan semakin banyak bebas visa maka semakin kuat paspornya. Publik tidak mengetahui proses maupun konstruksi dari kekuatan itu sendiri. Implikasi dari penggunaan kata kekuatan dalam realitas sosial menyebabkan reaksi ketidakpuasan publik. Ketidakpuasan ini menjadi kritik serta tuntutan bagi pemerintah untuk meningkatkan kekuatan paspor Indonesia.

Dokumen paspor mengandung berbagai perdebatan kontemporer mengenai keamanan negara, kebebasan migrasi, hak

about.php.

9 Roy F. Baumeister et al., “Bad Is Stronger Than Good,” *Review of General Psychology* 5, no. 4 (2001), <https://doi.org/10.1037/1089-2680.5.4.323>; Katja Corcoran and Thomas Mussweiler, “The Cognitive Miser’s Perspective: Social Comparison as a Heuristic in Self-Judgements,” *European Review of Social Psychology* 21, no. 1 (March 2010): 78–113, <https://doi.org/10.1080/10463283.2010.508674>.

sipil, identitas, kesenjangan sosial, globalisasi, kesenjangan distribusi dan akses sebagai karakter sistem ekonomi global.¹⁰ Paspor dan visa menjadi batas imajiner yang memisahkan komunitas berdasarkan entitas politik dengan memperkuat identitas nasional. Karena menjadi batas imajiner, kebijakan tersebut menjadi garis demarkasi antara *us and others* yang berkembang menjadi diskriminasi atas nama keamanan nasional. Kebijakan visa menciptakan kesenjangan terutama bagi negara-negara dengan kekuatan atau peringkat mobilitas yang rendah sebagai pihak yang paling dirugikan, sementara negara-negara kaya di Barat memiliki akses lebih banyak dan sebaliknya mereka membatasi negara lain untuk masuk ke negaranya.¹¹ Ketika warga negara *Global North* memiliki privilese dalam bepergian, warga negara *Global South* harus melewati proses visa yang panjang di konsulat, antrean, dan bahkan interogasi di pintu perbatasan.¹² Terdapat hubungan yang erat antara menegakkan kedaulatan di perbatasan untuk keamanan nasional dan pembatasan mobilitas. Setiap individu yang melintasi perbatasan memiliki potensi untuk mengganggu keamanan nasional sehingga negara menguatkan kontrol di perbatasan. Tren ini dapat dilihat dari sensitivitas terhadap migran sejak peristiwa 9/11 dan gelombang pengungsi dari kawasan Mediterania ke Eropa. Kontrol yang ketat terhadap visa bagi negara-negara Selatan merugikan mereka dalam hal waktu, uang dan rencana perjalanan.¹³

10 Jesper Gulddal and Charlton Payne, “Passports: On the Politics and Cultural Impact of Modern Movement Control,” *Symploke* 25, no. 1–2 (2017): 10–11, <https://doi.org/10.5250/symploke.25.1-2.0009>.

11 Eric Neumayer, “Unequal Access to Foreign Spaces: How States Use Visa Restrictions to Regulate Mobility in a Globalized World,” *Transactions of the Institute of British Geographers* 31, no. 1 (2006): 72–84, <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2006.00194.x>.

12 A K M Ahsan Ullah, Diotima Chattoraj, and Arju Afrin Kathy, “Mobility in a Globalised World: How Countries Regulate Mobility with Passports and Visas,” *Journal of Public Affairs* 24, no. 3 (2024): e2932, <https://doi.org/10.1002/pa.2932>.

13 Ullah, Chattoraj, and Kathy, 2.

Diskriminasi adalah salah satu aspek diskursus kekuatan paspor.

Sebagai realitas sosial, diskursus mengenai kekuatan paspor menarik untuk dibahas. Hal ini bukan hanya karena mengandung unsur diskriminatif tetapi juga karena terdapat makna-makna implisit terkait kekuatan dalam hubungan internasional. Istilah kekuatan dalam konteks paspor memunculkan berbagai macam pertanyaan serta kompleksitas dalam diskursus tersebut. Mengapa Tiongkok (59)¹⁴ dan India (80) yang memiliki populasi, militer dan ekonomi yang besar, paspornya berada di bawah San Marino (16) yang kurang populer dalam politik internasional? Mengapa kekuatan paspor Indonesia (64) lebih rendah dibandingkan Timor Leste (50)? Apakah faktor geografis memengaruhi kekuatan paspor? Apakah frekuensi perjalanan internasional oleh warga suatu negara berdampak pada peningkatan peringkat? Jika demikian, apakah negara-negara dengan peringkat rendah memiliki peluang yang sama? Apakah Indeks Pembangunan Manusia (HDI) memberikan wawasan tentang hubungan antara kekuatan paspor dan peringkat? Pertanyaan-pertanyaan ini membentuk kerangka untuk memahami dan mengkaji diskursus tentang kekuatan paspor.

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara *Henley Passport Indeks* (HPI), Indeks Persepsi Korupsi (CPI), Indeks Perdamaian Global (GPI), dan Laporan Kebahagiaan Dunia (WHR).¹⁵ Negara-negara yang memiliki peringkat tinggi pada *The Henley Passport Indeks* cenderung memiliki peringkat tinggi pada CPI, GPI, dan WHR. Negara-negara dengan HPI tinggi mendapatkan akses bebas visa ke banyak negara lain karena

persepsi positif dan tidak dianggap sebagai ancaman oleh negara tujuan. Namun, penelitian ini belum mengungkap struktur kualitatif dari kekuatan dan konteks interaksi terhadap pemberian visa.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah diskursus kekuatan paspor berbanding lurus dengan kekuatan material suatu negara? Selain itu tulisan ini bertujuan mengungkap konteks yang menyebabkan paspor Indonesia lebih lemah dibandingkan negara-negara tetangga meskipun secara faktual kapabilitas material Indonesia lebih unggul. Tidak jelas yang dimaksud dengan kekuatan dalam diskursus publik: apakah paspornya sebagai dokumen atautkah negara penerbit paspor yang kuat. Untuk memperjelas pemaknaan maka unit analisis kekuatan yang dimaksud dalam tulisan ini merujuk pada negara penerbit paspor, karena paspor diterbitkan oleh negara berdaulat. Korelasi antara makna intrinsik kekuatan suatu negara yang tercermin dalam paspornya melampaui sekadar kemampuan mobilitas. Artikel ini juga mengkritisi penggunaan istilah kekuatan dan mengeksplorasi hubungan yang terlibat dalam wacana kekuatan paspor. Artikel ini berupaya untuk memberi eksplanasi bagi publik mengenai diskursus kekuatan paspor.

Kekuatan dan Konstruktivisme

Kekuatan (power) merupakan konsep penting dalam ilmu hubungan internasional. Konsep ini masih menjadi perdebatan di antara para akademisi tentang apa makna dari konsep tersebut.¹⁶ Konsep kekuatan berkembang dari tradisi realisme pada pemaknaan kapabilitas negara untuk menggunakan sumber daya materialnya sehingga membuat pihak lain melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan.¹⁷ Secara tradisional realisme

14 Angka dalam tanda kurung menunjukkan peringkat paspor dalam The Henley Passport Index tahun 2024.

15 Hilary I. Okagbue et al., "Significant Predictors of Henley Passport Index," *Journal of International Migration and Integration* 22, no. 1 (March 15, 2021): 21–32, <https://doi.org/10.1007/s12134-019-00726-4>.

16 Daniel Drezner, "Power and International Relations: A Temporal View," *European Journal of International Relations* 27, no. 1 (2021): 29, <https://doi.org/10.1177/1354066120969800>.

17 Michael Barnett and Raymond Duvall, "Power in

memandang kekuatan sebagai instrumen dan tujuan utama dalam politik internasional. Mearsheimer menegaskan bahwa kekuatan berdasarkan pada kapabilitas material tertentu yang dimiliki suatu negara yaitu berupa *tangible assets* yang menentukan kekuatan militer suatu negara. Ekspresi dari kekuatan tersebut adalah kekuatan laten (sumber daya sosio-ekonomi) dan kekuatan militer.¹⁸ Kekuatan militer menjadi yang utama sedangkan kekuatan laten seperti ekonomi, populasi, politik, teknologi menjadi pendukung kekuatan utama. Realisme memandang kekuatan material sebagai atribut-atribut yang dapat dikalkulasikan dan dikuantifikasi keunggulannya.

Pengutamakan kapabilitas material bagi realisme merupakan instrumen dan tujuan untuk bertahan hidup dalam anarki sistem internasional. Kondisi anarki menyebabkan setiap negara fokus pada keberlangsungan hidup (*survive*) dengan mengutamakan kepentingan jangka pendek.¹⁹ Kekuatan militer dan sumber daya *tangible* berperan sebagai jaminan keamanan sehingga ketika terjadi ancaman negara memiliki independensi dalam merespon ancaman tersebut.²⁰ Realisme percaya bahwa negara harus independen dalam memenuhi kapabilitas materialnya sehingga kerja sama dengan negara lain dilakukan atas dasar pemenuhan kepentingan bukan kepercayaan. Ketika realisme membicarakan kekuatan maka mereka berhenti pada perbandingan kapabilitas material tanpa menjelaskan mengenai konteks ketika terjadi paradoks luaran.²¹ Pada kondisi ideal,

International Politics," International Organization 59, no. 01 (2005): 40, <https://doi.org/10.1017/S0020818305050010>.

18 John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, W. W. Norton (New York: W.W.Norton & Company, 2001), 55.

19 Drezner, "Power and International Relations: A Temporal View," 36.

20 Giulio M Gallarotti, "Soft Power: What It Is, Why It's Important, and the Conditions for Its Effective Use," *Journal of Political Power* 4, no. 1 (2011): 27, <https://doi.org/10.1080/2158379X.2011.557886>.

21 Joseph S. Nye, "Soft Power: The Evolution of a Concept," *Journal of Political Power* 14, no. 1

kekuatan yang besar seharusnya menghasilkan luaran yang sesuai dengan harapan. Namun, paradoksnya, hasil yang diperoleh seringkali tidak sebanding dengan besarnya kekuatan yang digunakan.

Kekuatan paspor dari perspektif realisme adalah simbol dari prestise dan privilese. Dalam diskursus kekuatan paspor jumlah bebas visa yang diperoleh menjadi atribut kekuatan yang dikuantifikasi dan dibandingkan dengan logika bahwa semakin banyak suatu negara memperoleh bebas visa maka semakin kuat paspornya. Kekuatan suatu negara dilambangkan melalui keunggulan mobilitas paspornya sehingga paspor menjadi salah satu atribut kekuatan material negara untuk *survive* dalam anarki.

Namun, paspor sebagai atribut kekuatan material dalam realisme tidak mampu menjelaskan diskursus kekuatan paspor dalam tiga aspek. Pertama kebijakan bebas visa diberikan untuk kepentingan jangka panjang berupa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang mana hal ini kontraproduktif dengan kepentingan jangka pendek yaitu keamanan negara yang selama ini menjadi fokus realisme. Kedua pemberian visa dilakukan berdasarkan prinsip resiprokal dengan asesmen kepercayaan bahwa warga negara yang diberikan bebas visa tidak akan menjadi potensi bahkan sumber ancaman, sedangkan realisme sendiri pesimis pada kerja sama terlebih pemberian bebas visa mengandung potensi ancaman dari pendatang. Ketiga, realisme tidak dapat menjelaskan anomali paradoks kekuatan mengapa negara-negara dengan kapabilitas material besar tetapi memiliki kekuatan paspor yang rendah dan begitu juga sebaliknya. Mengapa *great power* seperti Tiongkok dan Rusia berada pada kuadran yang sama dengan Indonesia, sedangkan negara-negara kecil di Uni Eropa memiliki kekuatan paspor yang lebih tinggi (Gambar 3). Menempatkan kekuatan paspor

(2021): 197-99, <https://doi.org/10.1080/2158379X.2021.1879572>.

sebagai kekuatan material tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan.

Dalam beberapa tahun terakhir pemaknaan kekuatan telah bergeser dari fokus kekuatan material ke relasi sosial. Pemaknaan ini sejalan dengan konstruktivisme, meskipun secara khusus konstruktivis tidak menekankan pada aspek kekuatan dalam relasi antarnegara sebagaimana realisme. Konstruktivis meyakini bahwa faktor ideasional dalam relasi sosial menentukan makna dan perilaku. Sejalan dengan hal tersebut, diskursus kekuatan paspor sepakat bahwa kekuatan tersebut dinilai berdasarkan jumlah bebas visa yang mana pemberian visa sebenarnya didasarkan pada interaksi bilateral (relasi sosial). Tanpa adanya interaksi bilateral atau hubungan diplomatik antarnegara, tidak akan ada kebijakan visa. Realisme tidak dapat menjelaskan dalam konteks seperti apa dan bagaimana suatu negara memperoleh atau memberi bebas visa.

Artikel ini menggunakan perspektif konstruktivis yang dapat menjawab tiga kelemahan dari realisme melalui pemahaman konteks untuk mendapatkan pemahaman diskursus kekuatan paspor. Kekuatan dalam relasi sosial adalah fokus yang digunakan untuk mengungkap paradoks diskursus kekuatan paspor. Kekuatan diproduksi di dalam, dan melalui relasi sosial, yang berdampak pada pembentukan kapasitas aktor untuk mengendalikan keadaan mereka.²² Oleh karena itu kekuatan menjadi atribut dalam interaksi yang membentuk perilaku atau kondisi perilaku orang lain. Pandangan lain mengenai kekuatan tidak selalu berarti tujuan tetapi juga konteks dan proses.²³ Dari kedua pandangan tersebut, kekuatan berada dalam relasi sosial baik itu berupa konteks maupun atribut yang melekat dalam relasi tersebut.

Realitas sosial memiliki relasi yang reflektif sebagai konstruksi pengetahuan dan konstruksi realitas sosial atau dengan kata

22 Barnett and Duvall, 45.

23 Nye, "Soft Power: The Evolution of a Concept."

lain konstruksi sosial atas pengetahuan dapat memengaruhi terbentuknya realitas sosial, dan realitas sosial juga dapat memengaruhi cara pengetahuan dikonstruksi.²⁴ Paspor adalah benda material namun gagasan tentang kekuatan paspor berada dalam ranah ide yang terbentuk melalui relasi sosial. Konsep-konsep mengenai kekuatan yang telah ada sebelumnya membentuk cara kita memahami dan menginterpretasikan makna serta pengetahuan. Pengetahuan bersifat sosial dan intersubjektif karena konsep-konsep yang kita gunakan bagian dari bahasa.

Paspor walaupun merupakan benda material namun memiliki makna yang jauh melampaui fungsinya sebagai dokumen perjalanan. Gagasan tentang kekuatan paspor bukan hanya sekadar atribut fisik, melainkan berada dalam ranah ide yang terbentuk dan dipertukarkan melalui interaksi sosial. Konsep-konsep mengenai kekuatan yang telah ada sebelumnya memainkan peran dalam bagaimana kita memahami dan menginterpretasikan kekuatan paspor. Namun pengetahuan bersifat sosial dan intersubjektif yang tercipta dari bahasa yang digunakan masyarakat. Bahasa itu sendiri tidak sepenuhnya subjektif atau objektif melainkan hadir secara kolektif di antara penggunanya, berkembang dan berubah melalui interaksi manusia.²⁵ Bahasa merupakan sarana kolektif yang kita gunakan untuk menyusun dan membentuk makna. Narasi tentang kekuatan paspor muncul dalam diskusi publik yang melibatkan testimoni dan emosi dalam melakukan perjalanan internasional.

Kekuatan dalam konteks ini merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi ada pemahaman umum bahwa semakin kuat paspor, semakin mudah perjalanan dilakukan. Aspek ideasional

24 Stefano Guzzini, "A Reconstruction of Constructivism in International Relations," *European Journal of International Relations* 6, no. 2 (2000): 499, <https://doi.org/10.1177/135406610006002001>.

25 Guzzini, "A Reconstruction of Constructivism in International Relations," 2000, 498.

berperan dalam distribusi pengetahuan di dalam konteks sosial. Distribusi pengetahuan adalah fenomena yang lebih luas daripada distribusi kepentingan karena mencakup komponen ideasional dari kepentingan, kepercayaan, dan ekspektasi.²⁶ Analisis konseptual mengenai makna kekuatan merupakan bagian dari konstruksi sosial pengetahuan. Pendefinisian kekuatan itu sendiri merupakan pelaksanaan kekuatan yang bersifat politis dari konstruksi sosial atas realitas.²⁷ Ketika paspor dilabeli 'kuat', terdapat aktor dan kepentingan tertentu yang mendorong terciptanya realitas sosial tersebut.

Dalam diskursus mengenai kekuatan paspor, identitas paspor dinilai sebagai 'kuat' atau 'lemah' berdasarkan akses mobilitas yang dimilikinya. Praktik pelabelan 'kekuatan' meskipun merupakan hal yang umum namun hal ini dapat menyesatkan karena menyiratkan bahwa kekuasaan merupakan properti dari satu aktor dan bukannya relasi aktual atau potensial antar aktor.²⁸ Pelabelan kuat atau lemah dari suatu paspor merupakan sumber daya diskursif dan simbolis dari *productive power* (kekuatan produktif) yang membangun institusi sosial.²⁹ Konteks kekuatan paspor yang diproduksi dalam relasi sosial sebagai *productive power* merupakan pembentukan subjek sosial dengan berbagai kekuatan sosial melalui sistem pengetahuan dan praktik diskursif yang luas dan umum.³⁰ *Productive power* beralih dari fokus struktur ke sistem

pemaknaan yang terstruktur (namun bukan struktur itu sendiri) serta jaringan kekuatan sosial yang saling membentuk secara dinamis. Relasi sosial dan pengetahuan tentang kekuatan paspor terus berkembang, diperkuat, dan ditransformasi oleh relasi antara individu, negara, serta struktur sosial. Ide-ide ini selanjutnya menjadi bagian dari pemahaman kolektif yang mempengaruhi cara kita melihat identitas paspor dan mobilitas global.

Artikel ini menganalisis diskursus kekuatan paspor sebagai proses produktif pengetahuan. Relasi sosial antarnegara menghasilkan kebijakan visa yang dinilai sebagai atribut kekuatan oleh aktor *Henley & Partners*. Aktor tersebut mempunyai motivasi dan kepentingannya sendiri dalam memproduksi pengetahuan mengenai kekuatan paspor sebagai realitas sosial yang menjadi diskursus publik, media, dan negara. Relasi tidak langsung dari publik, media, dan negara karena diskursus terjadi dalam ruang yang terbatas terutama mereka yang memiliki pengalaman mobilitas. Untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis akan melihat dari relasi sosial, atribut kekuatan, serta motivasi dan kepentingan dari narasi kekuatan paspor (Gambar 2).

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer statistik yang berasal dari lembaga resmi (PBB dan institusi internasional). Komparasi antara kekuatan paspor dan kekuatan material negara dilakukan untuk menguji apakah diskursus kekuatan paspor berbanding lurus dengan kekuatan material suatu negara. Komparasi menghasilkan konstruksi kekuatan paspor yang disintesis sebagai makna intrinsik kekuatan negara melalui paspor.

Variabel kontrol yang digunakan adalah peringkat kekuatan paspor dari *The Henley Passport Index* (HPI) tahun 2024.

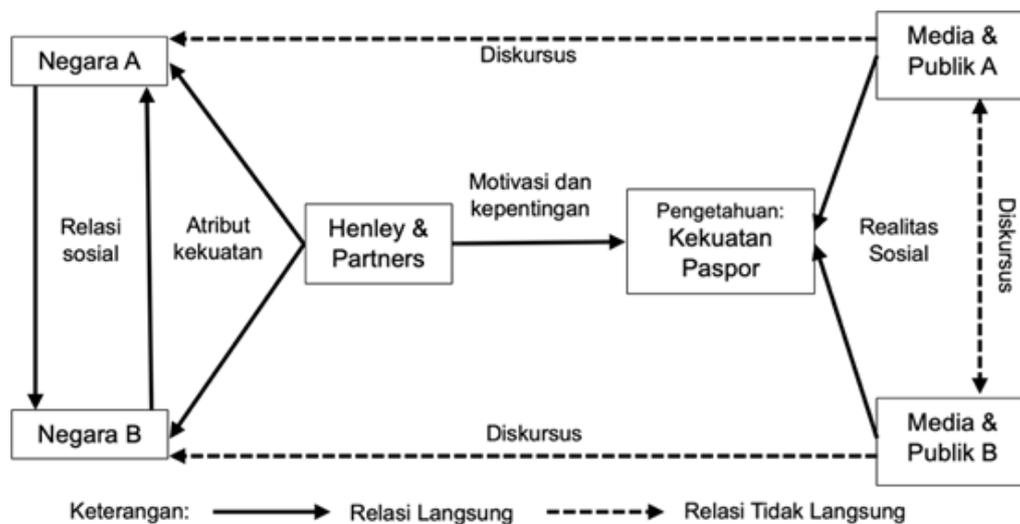
26 Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, 1st ed. (Cambridge University Press, 1999), 140, <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511612183/type/book>.

27 Guzzini, "A Reconstruction of Constructivism in International Relations," 513.

28 David A. Baldwin, *Power and International Relations: A Conceptual Approach*, *Power and International Relations: A Conceptual Approach*, 2016, 50, <https://doi.org/10.5860/choice.198007>.

29 Rodney Bruce Hall, "Deontic Power, Authority, and Governance in International Politics," *International Relations* 32, no. 2 (June 13, 2018): 186, <https://doi.org/10.1177/0047117817729195>.

30 Barnett and Duvall, "Power in International Politics," 55.



Gambar 2. Ilustrasi Kerangka Analisis
 Sumber: Olahan penulis, 2024.

Dasar pertimbangan adalah klaim historis pemeringkatan yang konsisten dilakukan selama 18 tahun serta metodologinya yang sederhana dari *Henley & Partners*. Batasan peringkat HPI yang dianalisis adalah 50 besar negara dengan akses mobilitas tertinggi sesuai dengan bebas visanya dan 50 besar sesuai peringkat indikator.

Variabel independen yang digunakan sebagai indikator atribut kekuatan material berupa: *outbond tourism*, populasi, anggaran militer, GDP, Indeks Pembangunan Manusia (HDI UNDP), afiliasi organisasi dan geografis. Untuk setiap indikator³¹ juga akan dilakukan pemeringkatan 50 besar. *Outbond tourism* tahun 2019 mengukur mobilitas ke luar negeri melalui jumlah keberangkatan dari negara tinggal ke negara lain. Populasi per negara tahun 2023 data *World Bank*, peringkat anggaran militer tahun 2024 dari *The International Institute for Strategic Studies*, GDP tahun 2023 dari *World Bank*, dan indeks pembangunan manusia dari UNDP.

31 Karena keterbatasan data terkini maka beberapa indikator tidak menyajikan data baru, namun pengaruhnya ke deviasi peringkat paspor per tahun tidak terlalu besar.

Relasi Sosial: Hubungan Bilateral Negara Berdaulat

Paspor dan visa merupakan instrumen mobilitas sebagai tanda kedaulatan negara. Kedaulatan adalah hak tertinggi suatu negara untuk mengatur pemerintahan dan teritorialnya tanpa campur tangan pihak lain. Konsekuensi dari kedaulatan adalah hak negara untuk membuat dan menerapkan hukum nasionalnya. Hukum imigrasi menentukan siapa yang boleh masuk dan tidak boleh dengan membuat klasifikasi aktivitas dan entitas yang diperbolehkan. Setiap negara mempunyai kepentingan dalam menjaga perbatasannya untuk mengontrol populasi, membatasi akses terhadap pasar buruh, dan kebutuhan masyarakat, serta menjaga keamanan internal.³² Negara berdaulat secara ketat menentukan mobilitas sah atau tidak berdasarkan pada dokumen yang dikeluarkan negara berdaulat (negara asal). Negara yang berdaulat dengan demikian menurunkan sebagian otoritasnya untuk melegitimasi subjek dan mengontrol pergerakannya ke dalam dokumen-dokumen perjalanan.³³

32 Fiona B Adamson, "Crossing Borders: International Migration and National Security," *International Security* 31, no. 1 (2006): 176, <https://doi.org/10.1162/isec.2006.31.1.165>.

33 Mark B Salter, *Rights of Passage: The Passport in*

Kebijakan untuk memberikan atau membebaskan visa muncul dari interaksi antarnegara yaitu dalam konteks hubungan bilateral. Interaksi ini menciptakan *mutual understanding* mengenai identitas masing-masing pihak dan bagaimana mereka memandang diri sendiri dan pihak lain dalam relasi tersebut. Pengalaman historis atau pengetahuan yang tertanam menjadi faktor ideasional dalam persepsi relasi. Identitas dan pengetahuan bersama memiliki sifat konstitutif, yang berarti keduanya saling membentuk melalui interaksi. Paspor merupakan objek material, tetapi akses mobilitas yang dimiliki dipengaruhi oleh identitas pemegang paspor tersebut.

Ide mengenai negara lain bermacam-macam, seperti: negara maju, negara berkembang, negara terbelakang, negara lemah, negara gagal, mitra, atau musuh. Ide itu menjadi pengetahuan yang mendasari keputusan negara untuk memberikan akses visa ataupun tidak memberikan visa bagi pemegang paspor tertentu. Karena paspor merepresentasikan identitas negara maka paspor dalam hal ini menjadi unsur materialnya, sedangkan pengalaman dan pengetahuan menjadi unsur ideasional yang menentukan keputusan visa. Karena sifatnya intersubjektif maka asesmen kebijakan visa bersifat eksklusif per negara, terlepas dari kekuatan material negara tersebut. Ide atau gagasan seperti apa yang dimiliki negara pemberi visa terhadap negara penerima visa. Intersubjektivitas ini tidak dapat dijelaskan melalui argumen kekuatan paspor yang tampaknya menyajikan pemahaman hubungan internasional secara sederhana, sesuai dengan logika umum publik. Jika penilaian tersebut diabaikan maka paspor kembali pada fungsinya sebagai penanda kewarganegaraan.

Paspor mencerminkan kemampuan negara yang menerbitkannya serta kualitas hubungan

International Relations (Boulder, Co: Lynne Rienner Publishers, 2003), 6.

diplomatik. Mengapa paspor Tiongkok (59), meskipun kekuatannya hampir setara dengan Amerika Serikat (8) memiliki akses bebas visa yang rendah? Hal ini dapat dilihat tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga melalui persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Selain itu, terdapat keterkaitan dengan organisasi internasional tertentu yang tidak dimiliki oleh Tiongkok. Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah sekutu dalam forum seperti NATO dan OECD, serta terintegrasi di kawasan Atlantik, sedangkan di Asia Timur tidak ada kerja sama regional yang sebanding.

Paspor dapat meningkatkan kekuatannya apabila terjadi perubahan ideasional dalam interaksi antarnegara. Dalam hal ini perubahan struktural tergantung pada perubahan sistem ekspektasi yang mungkin saling menguatkan.³⁴ Apabila ekspektasi dan kepercayaan meningkat maka preferensi kebijakan pun akan mengikuti. Perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *shared knowledge*. Negara yang memiliki kepercayaan dan ekspektasi positif akan memberikan kemudahan akses bagi negara yang sejenis, begitu pula sebaliknya. Perubahan terhadap identitas dan kepercayaan akan mengakibatkan perubahan dalam kebijakan visa. Perubahan tersebut bisa memberikan akses visa ataupun membatasi.

Idealnya pemberian visa diberikan secara resiprokal, namun sebagian negara melonggarkan aspek keamanan untuk kepentingan ekonomi. Praktik ini lazim dilakukan oleh negara-negara yang menginginkan kuantitas kunjungan pariwisata. Jadi meskipun sebenarnya kesetaraan akses dapat dicapai melalui diplomasi visa yang resiprokal, sebagian negara melonggarkan kedaulatannya untuk tujuan ekonomi. Pada diskursus kekuatan paspor Indonesia, pola pelonggaran ini terus dilakukan sejak 2011

34 Alexander Wendt, "Constructing International Politics," *International Security* 20, no. 1 (1995): 80, <https://doi.org/10.2307/2539217>.

dengan meliberalisasi kebijakan keimigrasian melalui pemberian visa bebas visa untuk wisatawan asing.³⁵ Pada 2023 sektor pariwisata Indonesia berkontribusi untuk GDP sebesar 3,8% dengan nilai devisa USD 10,46 miliar.³⁶ Tren kontribusi sektor pariwisata terus mengalami peningkatan setelah pandemi Covid-19, meskipun kinerjanya masih belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi.

Ketika kebijakan bebas visa Indonesia diberikan tanpa memperhitungkan aspek resiprokal, maka daya tawar visa sebagai alat kedaulatan dan diplomasi menurun. Hal ini karena tanpa adanya kesetaraan dalam pemberian akses, negara yang memberikan kebebasan visa dapat kehilangan *leverage* diplomatik dan pengaruh yang seharusnya dimiliki. Peraturan Presiden nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan memberikan akses bagi 169 negara dan entitas politik yang mana regulasi ini tidak memperhatikan aspek resiprokal dalam memberikan visa. Pemerintah sering kali dihadapkan pada dilema antara memprioritaskan kesejahteraan ekonomi dan menjaga keamanan nasional. Namun dalam konteks Indonesia pemerintah memilih untuk mendatangkan manfaat ekonomi sektor pariwisata melalui bebas visa dan *visa on arrival* kepada wisatawan.

Tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana memastikan kebijakan bebas visa yang efektif dan resiprokal. Ketika kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan secara resiprokal, mobilitas internasional mungkin tidak

meningkat secara signifikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menegosiasikan kebijakan visa yang saling menguntungkan. Hal ini bertujuan agar kebijakan bebas visa dapat meningkatkan mobilitas global secara seimbang serta tetap menjaga keamanan nasional dan kepentingan strategis negara. Penanganan ini memerlukan strategi diplomasi yang cermat, komunikasi yang efektif, dan pengaturan kebijakan yang adaptif untuk memastikan bahwa kebijakan visa berfungsi sebagai instrumen yang mendukung baik kesejahteraan ekonomi maupun keamanan nasional.

Atribut Kekuatan: Paspor sebagai Unsur Material

Paspor internasional menggunakan standar ICAO yang memuat identitas pemegang (nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin), nomor paspor, halaman pengesahan, halaman visa yang memuat kronologis perjalanan pemegang paspor. Pemaknaan paspor sebagai unsur material terjadi dalam interaksi. Unsur material tidak dapat mendefinisikan dirinya agen yang mendefinisikan. Tanpa gagasan tidak ada kepentingan, tanpa kepentingan tidak ada kondisi material yang berarti, tanpa kondisi-kondisi material tidak ada realitas.³⁷ Kondisi ini merupakan siklus distribusi ideasional terhadap material. Paspor tidak berharga kecuali jika diakui.³⁸ Paspor memperoleh maknanya melalui interaksi manusia dalam struktur pengetahuan bersama mengenai kekuatan yang menghubungkan identitas negara dan individu yang terikat padanya. Identitas yang melekat pada paspor, dari sisi negara maupun pemegangnya secara langsung memengaruhi bagaimana perlakuan dan tingkat kepercayaan negara lain

35 Andry Indrady, "Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen 'International Openness' Dengan Rezim Bebas Visa Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 17, no. 2 (November 9, 2021): 162, <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3609.153-171>.

36 Kemenparekraf RI, "Jumpa Pers Akhir Tahun, Kemenparekraf Paparkan Capaian Kinerja di Sepanjang 2023," Kemenparekraf RI, December 22, 2023, <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-jumpa-pers-akhir-tahun-kemenparekraf-paparkan-capaian-kinerja-di-sepanjang-2023>.

37 Wendt, *Social Theory of International Politics*, 139.

38 Stephen D. Krasner, *Power, the State, and Sovereignty* (Routledge, 2009), 229, <https://doi.org/10.4324/9780203882139>.

terhadap pemegang paspor tersebut. Dengan demikian, paspor tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga mencerminkan identitas, kekuasaan, dan posisi suatu negara dalam tatanan dunia yang lebih luas.

Dalam konteks mobilitas internasional pemeriksaan terhadap paspor sebelum keberangkatan terjadi ketika pengajuan visa, izin tinggal, saat keberangkatan di tempat pemeriksaan imigrasi, dan setelah berada di negara tujuan. Proses pemeriksaan tersebut tidak sederhana karena proses justifikasi yang subjektif dan kadang bias. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen perjalanan yaitu paspor dan visa, tujuan kedatangan, akomodasi, dan durasi tinggal. Aspek sosial dalam kekuatan paspor bukan karena dokumen tersebut berharga, namun karena petugas yang menegakan aturan dan menjadikan paspor sebagai alat pembuktian.³⁹ Biasanya justifikasi petugas karena adanya stereotip asal negara pemegang paspor yang menjadi standar nilai yang tertanam dalam menentukan kelayakan. Ketika orang dari negara dengan paspor lemah datang tingkat kewaspadaan petugas meningkat, evaluasi mendalam dilakukan mengenai validitas dokumen, tujuan kedatangan, dan kemampuan finansial. Bahkan proses ini sebelumnya telah dilakukan saat pengajuan visa. Akan tetapi ketika pemegang paspor kuat datang, pemeriksaan tidak seketat yang dialami paspor lemah.

Penumpang sering menghadapi ketidakadilan dalam perjalanan akibat perbedaan status sosial. Negara-negara yang kaya dengan asumsi status sosial yang tinggi sering mendapatkan kemudahan di perbatasan, sementara kesulitan yang dialami oleh sebagian penumpang lain menyebabkan perasaan status sosial yang lebih rendah.⁴⁰

39 Michael Buckland, "Documentality Beyond Documents," *Monist* 97, no. 2 (2014): 182, <https://doi.org/10.5840/monist201497212>.

40 Harpaz, "Conspicuous Mobility: The Status Dimensions of the Global Passport Hierarchy," 33.

Diskriminasi rasial baik secara langsung maupun tidak langsung dengan visa memang terjadi pada kelompok kulit berwarna.⁴¹ Makna kekuatan tergantung pada struktur yang mendasari pengetahuan bersama persepsi dan ekspektasi. Apakah tujuan dari pemberian visa akan memenuhi ekspektasi. Bagaimana persepsi negara pemberi terhadap warga negara dan warga negara yang diberikan bebas visa. Persepsi dan ekspektasi tersebut berasal dari pengetahuan dalam interaksi sosial.

Gambar 3^{42 43 44 45 46} merupakan visualisasi dari komparasi antara kekuatan paspor (tanda kurung adalah peringkat) dan indikator-indikator kekuatan seperti: *outbond tourism*, populasi, anggaran militer, GDP, Indeks Pembangunan Manusia, afiliasi organisasi, dan geografis. Setiap lingkaran merepresentasikan indikator-indikator kekuatan material. Perpotongan antar lingkaran berarti keunggulan negara tersebut yang juga beririsan dengan indikator lain. Kuadran utama ABCDE merupakan negara-negara dengan kekuatan paspor tertinggi yang menunjukkan korelasi positif antara lima indikator kekuatan negara dan peringkat paspor. Akan tetapi meskipun secara kuantitatif paspor Singapura peringkat pertama tetapi kekuatan negaranya

41 Andrew S. Rosenberg, "Racial Discrimination in International Visa Policies," *International Studies Quarterly* 67, no. 2 (2023): 7, <https://doi.org/10.1093/isq/sqad032>.

42 World Bank, "International Tourism, Number of Departures," World Bank, accessed August 30, 2024, https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.DPRT?end=2019&most_recent_value_desc=true&start=2018&type=shaded&view=chart.

43 World Bank, "Population, Total," World Bank, accessed August 30, 2024, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?most_recent_value_desc=true.

44 The International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2024*, ed. Robert Wall and Rupert Schulenburg, *Military Balance* (London: Routledge, 2024).

45 World Bank, "GDP (Current US\$)," World Bank, accessed August 30, 2024, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true.

46 UNDP, "Human Development Insights," UNDP, accessed September 1, 2024, <https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks>.

tenaga kerja yang berkualitas.

Konteks Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan mengapa negara-negara yang unggul pada indikator ABCD terutama aspek ekonomi dan populasi seperti: India (80), Tiongkok (59), dan Indonesia (64) peringkatnya lebih rendah dibandingkan San Marino (16), karena persepsi warga negaranya berpotensi menyalahgunakan visa menjadi imigran ilegal guna meningkatkan kualitas hidup. Sementara negara-negara dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia tinggi sering kali dipandang lebih stabil, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga potensi pelanggaran visanya lebih kecil. Indikator Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh besar, karena negara dengan paspor kuat umumnya berada di kuadran ini. Indeks Pembangunan Manusia memberikan informasi yang akurat mengenai kapabilitas negara terhadap warga negara dan reputasi paspornya.

Indikator GDP dan anggaran militer saling memperkuat satu sama lain. Di kuadran C dan D, tidak ada negara yang hanya unggul pada salah satu indikator saja. Kekuatan negara dihasilkan dari kombinasi dengan indikator-indikator kekuatan lainnya. Jika suatu negara lebih memprioritaskan kapabilitas militer dibandingkan ekonominya, maka negara tersebut berada di kuadran BC dan ABC. Sebagai contoh, Ukraina (30) dalam kondisi perang memiliki mobilitas internasional yang lebih tinggi dan anggaran pertahanan yang lebih besar dibandingkan Maroko (66), Aljazair (82), dan Irak (99). Negara-negara dengan GDP besar di Amerika, Eropa, dan Asia Timur (kecuali Tiongkok (59)) mendapatkan lebih banyak akses karena kemampuan ekonomi mereka dipandang sebagai faktor penting dalam hubungan bilateral. Faktor ini digunakan untuk menilai apakah warga negara dari negara tersebut layak diberikan bebas visa dan mampu memenuhi kebutuhan mereka

sendiri di negara tujuan tanpa menjadi beban. Kondisi ini juga menjadi daya tarik bagi para imigran yang mencari peluang hidup yang lebih baik.

Perbandingan antara paspor Indonesia (64) dan paspor Malaysia (12) dalam kuadran yang sama, yaitu ABCD, menunjukkan bahwa Malaysia unggul dalam hal mobilitas internasional. Warga negara Malaysia lebih sering melakukan perjalanan ke luar negeri dibandingkan dengan warga negara Indonesia. Meskipun secara agregat Indonesia memiliki keunggulan pada indikator BCD, namun mobilitas paspor Malaysia lebih besar yang mencerminkan tingkat kepercayaan lebih tinggi terhadap negara dan pemegang paspor Malaysia. Singapura dan Malaysia merupakan dua negara di ASEAN yang dibebaskan dari kewajiban Visa Schengen.⁴⁷ Peluang meningkatkan kekuatan paspor Indonesia adalah dengan meningkatnya frekuensi mobilitas warga negara Indonesia sehingga membangun kepercayaan global terhadap warga negara Indonesia. Peningkatan frekuensi juga harus diimbangi dengan perilaku baik dan kepatuhan terhadap hukum negara tujuan. Bebas visa didapatkan karena reputasi dan kepercayaan bahwa warga negara tersebut tidak memerlukan pengawasan.

Afiliasi dengan organisasi internasional seperti Uni Eropa, OECD, dan NATO berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan internasional terhadap stabilitas politik negara-negara anggotanya. Uni Eropa menciptakan struktur supranasional yang mempertahankan stabilitas wilayahnya melalui kebijakan Visa Schengen yang bertujuan memfasilitasi mobilitas antarnegara anggota serta menyaring ancaman keamanan di perbatasan. Posisi geografis yang berdekatan, interaksi historis yang panjang, serta afiliasi

47 European Union, "Regulation (EU) 2018/1806 of The European Parliament and of The Council" (2018), Annex II, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1806#d1e1109-39-1>.

dengan organisasi seperti OECD⁴⁸ dan NATO, membantu menciptakan sistem kepercayaan dan kerja sama erat di antara negara-negara ini. Interaksi di forum-forum internasional tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik, tetapi juga meningkatkan persepsi global bahwa negara-negara anggota memiliki sistem politik dan keamanan yang stabil. Pada akhirnya kondisi ini menjadi nilai tawar yang meningkatkan keunggulan paspor dan mempermudah akses mobilitas global bagi warganya. Sementara negara-negara di Asia dan Afrika paling terdampak dari kesenjangan ini terutama negara-negara post-kolonial dan negara-negara di Timur Tengah yang secara politik rapuh.⁴⁹

Korelasi dari lima indikator kekuatan menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi memiliki dampak paling signifikan sedangkan kekuatan populasi penting namun tidak terlalu signifikan. Kekuatan ekonomi yang kuat tidak hanya akan mendukung pembangunan manusia dan meningkatkan kekuatan militer, tetapi juga kemampuan warga negaranya dalam melakukan perjalanan internasional. Sebaliknya, ketika populasi besar tetapi tidak diiringi kapabilitas ekonomi maka kekuatan paspornya juga lemah (kuadran B). Negara dengan kekuatan ekonomi per kapita yang kuat memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi sehingga berkontribusi pada kekuatan paspornya. Kelima indikator kekuatan di atas berkaitan dengan atribut material kekuatan negara sedangkan realitas sosial menunjukkan bahwa kapabilitas material yang tinggi tidak selalu sebanding dengan kekuatan mobilitas internasional. Visa diberikan atas dasar kepercayaan (ideasional) tidak hanya kapabilitas negara (material). Ketika kecurigaan masih ada meskipun negara

tersebut memiliki kapabilitas yang lebih besar maka bebas visa tidak akan diberikan.

Motivasi dan Kepentingan

Narasi kekuatan paspor diciptakan oleh *The Henley & Partners* melalui instrumennya HPI. *The Henley & Partners* adalah konsultan yang bidang usahanya pada perencanaan residensi dan kewarganegaraan melalui investasi (*citizenship-by-investment programs/CBI*). Sejak tahun 2006 data *The Henley Passport Index* disediakan sebagai referensi umum untuk menilai kekuatan paspor negara melalui kemudahan mobilitas. Dengan mengonstruksikan bahwa paspor memiliki kekuatan maka HPI menjadi sumber pengetahuan baru yang mendominasi nilai dan gagasan tentang akses mobilitas. Perilaku *The Henley & Partners* dalam diskursus kekuatan paspor merupakan bentuk dari *productive power* yang memproduksi pengetahuan mengenai kekuatan paspor serta melakukan pemeringkatan paspor yang sebelumnya belum dilakukan. Selain membentuk pengetahuan, *productive power* juga terletak pada kemampuan membangun hubungan baru antara negara dan individu-individu yang kaya yang berpotensi mengubah keduanya dan menghasilkan sesuatu yang baru.⁵⁰

Ekspektasi *The Henley & Partners* terhadap nilai dalam *The Henley Passport Index* adalah menumbuhkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap nilai paspor. Dalam konteks globalisasi akses mobilitas yang luas menjadi semakin penting yang bermuara pada program kewarganegaraan berbasis investasi. Program CBI memberikan kesempatan bagi individu untuk memperoleh kewarganegaraan alternatif (ganda) sebagai imbalan atas kontribusi finansial tertentu, seperti donasi atau investasi di negara tersebut yang seringkali

48 Steffen Mau et al., "The Global Mobility Divide: How Visa Policies Have Evolved over Time," *Journal of Ethnic and Migration Studies* 41, no. 8 (July 3, 2015): 1203, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1005007>.

49 Mau et al., 1205.

50 Sara Kalm, "The Business of Citizenship: Investment Citizenship Firms in Global Governance," *Global Society* 37, no. 1 (January 2, 2023): 77, <https://doi.org/10.1080/13600826.2021.2021863>.

tanpa harus memenuhi prasyarat domisili di negara tersebut.⁵¹ Kewarganegaraan alternatif memberi individu kebebasan dan mobilitas yang lebih besar dalam melakukan perjalanan internasional. Pada kasus ini kewarganegaraan dan paspor menjadi komoditas yang diperdagangkan. Kewarganegaraan tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral terikat pada nasionalisme tetapi menjadi realitas sosial baru yang mengedepankan kontribusi investasi. Secara praktis *The Henley & Partners* mendukung eksklusivitas bagi kelompok kaya untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda. *The Henley & Partners* dan konsultan-konsultan kewarganegaraan sejenis memiliki dua peran pada saat bersamaan, yaitu sebagai perantara regulasi dan broker.⁵² Dinamika ini memperkuat kesenjangan dalam mobilitas internasional mengukuhkan hak istimewa berdasarkan kemampuan ekonomi.

Angka-angka dalam *The Henley Passport Index* menciptakan pengetahuan baru bagi pembaca, mengungkap bahwa paspor memiliki derajat kekuatan tertentu. Dalam konteks globalisasi terbentuk proses *shared knowledge* yang mana individu sebagai *cognitive miser* akan menerima begitu saja diskursus mengenai kekuatan paspor tanpa mempertanyakan secara kritis. Diskursus ini kemudian direproduksi dan tersebar melalui interaksi sosial dengan media dan individu yang secara tidak langsung berperan sebagai agen yang mempromosikan agenda *The Henley & Partners* tanpa mempertimbangkan konstruksi realitas di baliknya. Karena wacana ini begitu mendominasi, publik akhirnya memprotes ketika paspor mereka dianggap lemah dibandingkan dengan negara lain, mempertanyakan mengapa kekuatan negara

mereka tidak berbanding lurus dengan kekuatan paspornya. Ketidakpuasan ini menggarisbawahi ketergantungan publik pada angka-angka peringkat tersebut tanpa menyadari bahwa 'kekuatan' paspor adalah hasil konstruksi sosial yang tidak merefleksikan kekuatan negara itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan komparasi yang dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa tidak tepat untuk menyamakan antara kekuatan paspor dan kekuatan negara. Komparasi telah menunjukkan bahwa kekuatan material negara tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan paspor. Beberapa negara yang secara kapabilitas material kuat dan populer seperti Tiongkok dan India malah memiliki kekuatan paspor menengah. Sementara Indonesia memiliki kekuatan paspor yang lebih rendah dibandingkan Timor Leste yang secara kapabilitas material jauh lebih lemah. Dalam kasus ini faktor ideasional seperti persepsi dan interaksi antarnegara memengaruhi pemberian visa terlepas dari kapabilitas materialnya. Faktor interaksi intersubjektif yang menghasilkan gagasan mengenai identitas, persepsi, pengalaman, ekspektasi, dan bahkan stereotip terhadap perilaku warga negara pemegang paspor turut memengaruhi keputusan pemberian visa. Konstruksi telah menunjukkan ada ambiguitas antara makna kekuatan paspor dan kekuatan negara. Penulis berpendapat bahwa istilah 'peringkat' lebih tepat daripada 'kekuatan' dalam menggambarkan derajat paspor suatu negara.

Diskursus tentang kekuatan paspor tidak berhenti pada pembicaraan mengenai seberapa kuat atau lemah paspor, tetapi juga pada makna yang lebih dalam dari kata 'kekuatan' itu sendiri. Penggunaan kata 'kekuatan' dapat menyesatkan publik, karena kekuatan tidak sederhana kapabilitas melakukan perjalanan

51 Kristin Surak, "Do Passports Pay off? Assessing the Economic Outcomes of Citizenship by Investment Programs," *Journal of Ethnic and Migration Studies*, May 22, 2024, 1, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2024.2332825>.

52 Kalm, "The Business of Citizenship: Investment Citizenship Firms in Global Governance," 75.

intenasional. Konsep kekuatan sebagai bagian dari konstruksi pengetahuan memiliki dimensi politis dengan pihak-pihak tertentu yang diuntungkan melalui narasi ini dalam wacana global. Menguntungkan kelompok elite, korporasi kewarganegaraan, dan negara-negara tertentu. Diskriminasi akses merupakan realitas yang dihadapi dan realitas itu adalah kondisi yang bukan terjadi ada adanya (*by given*). Apa yang kita percaya benar menurut kapabilitas material belum tentu benar dengan pemahaman ideasional tentang kekuatan, dan sebaliknya. Penggunaan kata kekuatan akan menjustifikasi struktur hegemoni yang ada dan memperkuat diskriminasi terhadap negara-negara dengan peringkat paspor yang lebih rendah.

Konstruksi kekuatan paspor memperlihatkan struktur us and others antara negara-negara Blok Barat di Eropa, Amerika, dan sekutunya di Asia yang dominan memiliki akses mobilitas lebih banyak dibandingkan kelompok others negara-negara yang dianggap berpotensi menjadi ancaman sosial atau keamanan, seperti Tiongkok, Rusia, serta negara-negara di Asia dan Afrika. Meskipun kondisi ini tampaknya terstruktur dengan jelas, terdapat kemungkinan untuk mengubah dinamika ini terutama untuk kepentingan nasional Indonesia. Perubahan tersebut memerlukan waktu dan komitmen politik yang kuat. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan visa sebagai instrumen diplomasi untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu kebijakan visa yang resiprokal dan proporsional. Sehingga akan mengurangi ketimpangan dalam akses mobilitas internasional dan memperbaiki hubungan antarnegara. Kajian selanjutnya berpeluang untuk menganalisis respon pemangku kebijakan terhadap diskursus kekuatan paspor Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, Fiona B. "Crossing Borders: International Migration and National Security." *International Security* 31, no. 1 (2006): 165–99. <https://doi.org/10.1162/isec.2006.31.1.165>.
- Baldwin, David A. *Power and International Relations: A Conceptual Approach*. Power and International Relations: A Conceptual Approach, 2016. <https://doi.org/10.5860/choice.198007>.
- Barnett, Michael, and Raymond Duvall. "Power in International Politics." *International Organization* 59, no. 01 (2005). <https://doi.org/10.1017/S0020818305050010>.
- Baumeister, Roy F., Ellen Bratslavsky, Catrin Finkenauer, and Kathleen D. Vohs. "Bad Is Stronger Than Good." *Review of General Psychology* 5, no. 4 (2001). <https://doi.org/10.1037/1089-2680.5.4.323>.
- Buckland, Michael. "Documentality Beyond Documents." *Monist* 97, no. 2 (2014): 179–86. <https://doi.org/10.5840/monist201497212>.
- Corcoran, Katja, and Thomas Mussweiler. "The Cognitive Miser's Perspective: Social Comparison as a Heuristic in Self-Judgements." *European Review of Social Psychology* 21, no. 1 (March 2010): 78–113. <https://doi.org/10.1080/10463283.2010.508674>.
- detikcom. "Ini Dia Paspor Paling Sakti & Paling Cupu Sedunia." detikcom, April 17, 2015. <https://travel.detik.com/travel-news/d-2890797/ini-dia-paspor-paling-sakti-paling-cupu-sedunia>.
- . "Sesakti Apa Paspor Indonesia, Cek Di Sini!" detikcom, April 17, 2015. <https://travel.detik.com/travel-news/d-2890729/sesakti-apa-paspor-indonesia-cek-di-sini>.

- Diah, Femi. "Paspor Indonesia Jadi Merah, Kapan Lebih Kuat?" detikcom, August 19, 2024. <https://travel.detik.com/travel-news/d-7496866/paspor-indonesia-jadi-merah-kapan-lebih-kuat>.
- Ditjen Imigrasi. "Kado Hari Ulang Tahun RI: Wajah Baru Paspor Indonesia." Ditjen Imigrasi, August 17, 2024. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/17/kado-hari-ulang-tahun-ri-wajah-baru-paspor-indonesia.
- Drezner, Daniel. "Power and International Relations: A Temporal View." *European Journal of International Relations* 27, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1177/1354066120969800>.
- European Union. Regulation (EU) 2018/1806 of The European Parliament and of The Council (2018). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1806#d1e1109-39-1>.
- Gallarotti, Giulio M. "Soft Power: What It Is, Why It's Important, and the Conditions for Its Effective Use." *Journal of Political Power* 4, no. 1 (2011): 25-47. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2011.557886>.
- Guzzini, Stefano. "A Reconstruction of Constructivism in International Relations." *European Journal of International Relations* 6, no. 2 (2000): 147-82. <https://doi.org/10.1177/1354066100006002001>.
- Hall, Rodney Bruce. "Deontic Power, Authority, and Governance in International Politics." *International Relations* 32, no. 2 (June 13, 2018): 173-93. <https://doi.org/10.1177/0047117817729195>.
- Harpaz, Yossi. "Conspicuous Mobility: The Status Dimensions of the Global Passport Hierarchy." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 697, no. 1 (September 21, 2021): 32-48. <https://doi.org/10.1177/000271622111052859>.
- Henley & Partners. "The Henley Passport Index Methodology." Henley & Partners. Accessed August 20, 2024. <https://www.henleyglobal.com/passport-index/about>.
- Indrady, Andry. "Neoliberalisme Versus Kebijakan Selektif Keimigrasian: Korelasi Komponen 'International Openness' Dengan Rezim Bebas Visa Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 17, no. 2 (November 9, 2021): 153-71. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3609.153-171>.
- Jesper Gulddal, and Charlton Payne. "Passports: On the Politics and Cultural Impact of Modern Movement Control." *Symploke* 25, no. 1-2 (2017): 9. <https://doi.org/10.5250/symploke.25.1-2.0009>.
- Kalm, Sara. "The Business of Citizenship: Investment Citizenship Firms in Global Governance." *Global Society* 37, no. 1 (January 2, 2023): 68-92. <https://doi.org/10.1080/13600826.2021.2021863>.
- Kemenparekraf RI. "Jumpa Pers Akhir Tahun, Kemenparekraf Paparkan Capaian Kinerja di Sepanjang 2023." Kemenparekraf RI, December 22, 2023. <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-jumpa-pers-akhir-tahun-kemenparekraf-paparkan-capaian-kinerja-di-sepanjang-2023>.
- Koschut, Simon. "The Power of (Emotion) Words: On the Importance of Emotions for Social Constructivist Discourse Analysis in IR." *Journal of International Relations and Development* 21, no. 3 (July 28, 2018): 495-522. <https://doi.org/10.1057/s41268-017-0086-0>.
- Krasner, Stephen D. *Power, the State, and Sovereignty*. Routledge, 2009. <https://doi.org/10.4324/9780203882139>.

- Mau, Steffen, Fabian Gülzau, Lena Laube, and Natascha Zaun. "The Global Mobility Divide: How Visa Policies Have Evolved over Time." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 41, no. 8 (July 3, 2015): 1192–1213. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1005007>.
- Mearsheimer, John J. *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton. New York: W.W.Norton & Company, 2001.
- Merdeka.com. "Paspor Indonesia Tak Laku Di Banyak Negara, Kalah Dari Zimbabwe." *Merdeka.com*, April 2, 2015. <https://www.merdeka.com/dunia/paspor-indonesia-tak-laku-di-banyak-negara-kalah-dari-zimbabwe.html>.
- Neumayer, Eric. "Unequal Access to Foreign Spaces: How States Use Visa Restrictions to Regulate Mobility in a Globalized World." *Transactions of the Institute of British Geographers* 31, no. 1 (2006): 72–84. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2006.00194.x>.
- Nye, Joseph S. "Soft Power: The Evolution of a Concept." *Journal of Political Power* 14, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1080/2158379X.2021.1879572>.
- Okagbue, Hilary I., Pelumi E. Oguntunde, Sheila A. Bishop, Patience I. Adamu, Elvir M. Akhmetshin, and Chukwuemeka O. Iroham. "Significant Predictors of Henley Passport Index." *Journal of International Migration and Integration* 22, no. 1 (March 15, 2021): 21–32. <https://doi.org/10.1007/s12134-019-00726-4>.
- Passport Index. "About Passportindex.Org." Accessed August 20, 2024. <https://www.passportindex.org/about.php>.
- Rosenberg, Andrew S. "Racial Discrimination in International Visa Policies." *International Studies Quarterly* 67, no. 2 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.1093/isq/squad032>.
- Salsabilla, Rindi. "Desain Baru Bikin Ranking Paspor RI Menguat? Ini Kata Sandiaga." *CNBC Indonesia*, August 21, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240821090806-33-565029/desain-baru-bikin-ranking-paspor-ri-menguat-ini-kata-sandiaga>.
- Salter, Mark B. *Rights of Passage: The Passport in International Relations*. Boulder, Co: Lynne Rienner Publishers, 2003.
- Surak, Kristin. "Do Passports Pay off? Assessing the Economic Outcomes of Citizenship by Investment Programs." *Journal of Ethnic and Migration Studies*, May 22, 2024, 1–22. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2024.2332825>.
- The International Institute for Strategic Studies. *The Military Balance 2024*. Edited by Robert Wall and Rupert Schulenburg. *Military Balance*. London: Routledge, 2024.
- Ullah, A K M Ahsan, Diotima Chatteraj, and Arju Afrin Kathy. "Mobility in a Globalised World: How Countries Regulate Mobility with Passports and Visas." *Journal of Public Affairs* 24, no. 3 (2024): e2932. <https://doi.org/10.1002/pa.2932>.
- UNDP. "Human Development Insights." UNDP. Accessed September 1, 2024. <https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks>.
- Wendt, Alexander. "Constructing International Politics." *International Security* 20, no. 1 (1995): 71–81. <https://doi.org/10.2307/2539217>.
- . *Social Theory of International Politics*. 1st ed. Cambridge University Press, 1999. <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511612183/type/book>.

- World Bank. "GDP (Current US\$)." World Bank. Accessed August 30, 2024. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true.
- . "International Tourism, Number of Departures." World Bank. Accessed August 30, 2024. https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.DPRT?end=2019&most_recent_value_desc=true&start=2018&type=shaded&view=chart.
- . "Population, Total." World Bank. Accessed August 30, 2024. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?most_recent_value_desc=true.